

PARTISIPASI PUBLIK DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: STRATEGI MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT

Latifah¹, Ai Nunung², Fatmawati³

^{1),2),3)} Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: Latifah@umbandung.ac.id¹, ainunung@umbandung.ac.id², fatmawati@umbandung.ac.id³

ABSTRACT

Public participation is an essential element in public policy formulation and plays a strategic role in building citizens' trust in local governments. This study aims to examine the forms of public participation in policy formulation in West Java Province and to analyze the role of such participation in enhancing public trust in local government in the digital era. The research employs a descriptive qualitative approach supported by simple quantitative data through a public trust survey. Data were collected through document analysis, in-depth interviews, participatory observations, and surveys of West Java residents, and were analyzed using thematic analysis with Likert scales as supplementary support. The findings indicate that public participation in West Java has been implemented through various mechanisms, both conventional and digital, such as Musrenbang (development planning forums), public consultations, and e-participation platforms. However, participation is still dominated by the stages of information provision and consultation, while partnership and citizen control have not yet developed optimally. The study also shows that substantive, transparent, and responsive public participation positively contributes to increasing public trust in local government. Therefore, strengthening inclusive, sustainable, and policy-impactful public participation strategies is essential to enhance public trust and improve the quality of local governance.

Keywords: *Public Participation, Policy Formulation, Public Trust*

ABSTRAK

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam formulasi kebijakan publik dan berperan strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk partisipasi publik dalam formulasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat serta menganalisis peran partisipasi tersebut dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana melalui survei kepercayaan publik. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan survei kepada masyarakat Jawa Barat, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dan skala Likert sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di Jawa Barat telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, baik konvensional maupun digital, seperti Musrenbang, konsultasi publik, dan platform e-participation. Namun, partisipasi tersebut masih didominasi pada tahap informasi dan konsultasi, sementara kemitraan dan kontrol masyarakat belum berkembang secara optimal. Temuan juga menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bersifat substantif, transparan, dan responsif berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan strategi partisipasi publik yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kebijakan diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kata kunci: *Partisipasi Publik, Formulasi Kebijakan, Kepercayaan Publik*

A. PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam praktik demokrasi kontemporer dan proses formulasi kebijakan publik. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum secara periodik, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi (misalnya melalui media sosial atau forum daring) untuk memperkuat legitimasi keputusan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan dapat memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dan mendorong keterlibatan publik yang lebih aktif dalam proses kebijakan publik, termasuk di Indonesia (Mannayong et al., 2024).

Partisipasi publik berperan penting dalam administrasi publik karena memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun dalam praktiknya di Indonesia, akses masyarakat terhadap saluran partisipasi formal masih belum merata, sehingga keterlibatan publik sering tetap bersifat simbolis dan belum menghasilkan perubahan kebijakan yang substansial (Riduan, 2025).

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah merupakan modal

sosial yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebuah kajian di Gowa, Indonesia, menunjukkan bahwa layanan pemerintahan digital yang transparan dan responsif mampu meningkatkan kepercayaan publik, yang selanjutnya mendorong partisipasi warga dalam aktivitas pemerintahan. Namun, kepercayaan publik yang tinggi belum serta-merta menjamin partisipasi yang optimal tanpa strategi inklusif yang memperhatikan literasi digital dan umpan balik masyarakat (Nurlinah et al., 2025).

Di Jawa Barat, pemerintah daerah dikenal berupaya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui inovasi digital seperti platform aspirasi daring dan sistem e-Musrenbang. Meskipun demikian, perlu dikaji apakah mekanisme partisipasi digital tersebut benar-benar memengaruhi keputusan kebijakan secara substansial atau hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata bagi publik. Studi lain juga menunjukkan bahwa optimalisasi partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, termasuk lewat e-government, berkaitan erat dengan kualitas komunikasi, transparansi informasi, dan peran media sosial sebagai saluran aspirasi (Nurhaliza, 2025).

Partisipasi publik yang substantif diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh peluang partisipasi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam kebijakan yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini memerlukan strategi yang tidak hanya membuka ruang untuk partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut berdampak terhadap hasil kebijakan (Sholihah & Santoso, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) apa saja bentuk partisipasi publik dalam formulasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat, dan (2) bagaimana peran partisipasi publik tersebut dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi partisipatif yang efektif untuk membangun kepercayaan publik di era digital.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Partisipasi Publik dalam Formulasi Kebijakan

Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, khususnya pada tahap formulasi kebijakan. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingannya sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan legitim. OECD (2023) menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari sekadar pemberian informasi hingga kontrol penuh oleh masyarakat. Partisipasi yang berdampak nyata adalah partisipasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi isi dan arah kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi publik umumnya diwujudkan melalui Musrenbang, konsultasi publik, serta mekanisme partisipasi digital

berbasis e-government (Nabatchi & Leighninger, 2023).

2. Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah

Kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bertindak secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Bouckaert dan Van de Walle (2023), kepercayaan publik menjadi modal sosial penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat (Kim, 2024). Ketika pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses kebijakan, kepercayaan publik cenderung meningkat.

3. Hubungan Partisipasi Publik dan Kepercayaan

Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara partisipasi publik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Partisipasi yang bersifat substantif membuat masyarakat merasa didengar dan dihargai, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah (OECD, 2023). Sebaliknya, partisipasi yang hanya bersifat formal atau simbolis justru dapat menurunkan kepercayaan publik.

Studi terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan partisipasi digital, seperti e-musrenbang dan platform aspirasi masyarakat, dapat meningkatkan persepsi transparansi dan kepercayaan publik apabila masukan masyarakat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan (Putra & Rachman, 2024). Dengan demikian, partisipasi publik dalam formulasi kebijakan merupakan strategi penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam partisipasi publik dalam formulasi kebijakan serta kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti menggali pandangan dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan (Creswell, 2016). Data kuantitatif digunakan sebagai pelengkap melalui survei kepercayaan publik.

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat partisipasi publik yang berbeda. Jawa Barat dipilih karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan aktif mengembangkan inovasi partisipasi publik melalui berbagai platform digital, seperti *LAPOR!*, *Jabar Quick Response*, dan *Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)*.

Subjek penelitian meliputi pemerintah daerah dan masyarakat. Informan penelitian terdiri dari pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, serta warga Jawa Barat sebagai responden survei. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan dan relevansi dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, survei kepercayaan publik, dan observasi partisipatif pada forum-forum publik seperti Musrenbang dan

konsultasi kebijakan. Survei menggunakan skala Likert untuk mengukur transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi publik.

Data kualitatif dianalisis menggunakan **analisis tematik**, sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat temuan. Analisis dikaitkan dengan teori partisipasi publik (Arnstein, 1969) dan kebijakan publik (Anderson, 1979). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam proses formulasi kebijakan dan berkontribusi langsung terhadap pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pembahasan hasil penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu tingkat partisipasi publik dan kualitas formulasi kebijakan, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik.

1. Tingkat Partisipasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan

Analisis tingkat partisipasi publik mengacu pada tahapan partisipasi menurut Arnstein (1969), yang meliputi informasi, konsultasi,

kemitraan, dan kontrol masyarakat. Keempat indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat Jawa Barat terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses kebijakan daerah.

Tabel 1
Indikator Partisipasi Publik dan Hasil Observasi di Jawa Barat

No	Indikator	Deskripsi	Hasil Observasi di Jawa Barat	Tingkat Ketercapaian
1	Informasi	Akses masyarakat terhadap informasi kebijakan publik	Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi melalui situs web resmi, media sosial, Jabar Super Apps, dan e-Musrenbang. Namun, informasi masih bersifat satu arah dan cenderung teknis	Sedang
2	Konsultasi	Pelibatan masyarakat dalam diskusi dan musyawarah	Musrenbang, dialog komunitas, dan survei daring rutin dilaksanakan, tetapi keterwakilan kelompok marginal masih terbatas	Sedang-Tinggi
3	Kemitraan	Kerja sama masyarakat dan pemerintah dalam kebijakan	Program desa digital, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan penanganan bencana menunjukkan kemitraan, meski pemerintah masih dominan	Sedang
4	Kontrol Masyarakat	Kendali masyarakat dalam pengambilan keputusan	Kontrol relatif terlihat pada tingkat desa (dana desa), namun masih sangat terbatas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	Rendah

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik di Jawa Barat masih didominasi oleh tahap informasi dan konsultasi, sementara kemitraan dan kontrol masyarakat belum berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa

partisipasi publik masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini berdampak pada terbatasnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

2. Partisipasi Publik dalam Formulasi Kebijakan Daerah

Selain menilai tingkat partisipasi, penelitian ini juga mengkaji bagaimana partisipasi publik memengaruhi kualitas formulasi

kebijakan daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator formulasi kebijakan menurut Anderson (1979), yaitu kejelasan masalah, alternatif solusi, analisis dampak, dan legitimasi politik.

Tabel 2
Indikator Formulasi Kebijakan dan Hasil Observasi di Jawa Barat

No	Indikator	Deskripsi	Hasil Observasi di Jawa Barat	Tingkat Ketercapaian
1	Kejelasan Masalah	Kejelasan perumusan masalah publik	Masalah kebijakan seperti transportasi, banjir, dan ketahanan pangan telah diidentifikasi, namun masih menggunakan bahasa teknis	Sedang
2	Alternatif Solusi	Ragam dan kualitas pilihan kebijakan	Terdapat alternatif solusi berbasis infrastruktur, komunitas, dan teknologi, tetapi analisis akademik masih terbatas	Sedang–Tinggi
3	Analisis Dampak	Kajian manfaat, biaya, dan risiko	Analisis masih bersifat administratif dan fiskal, dampak sosial ekonomi belum dianalisis secara mendalam	Rendah–Sedang
4	Legitimasi Politik	Dukungan aktor kunci dan publik	Kebijakan digitalisasi layanan publik memperoleh dukungan tinggi, namun kebijakan sensitif masih memicu perdebatan	Sedang–Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa partisipasi publik berkontribusi positif terhadap peningkatan legitimasi politik dan perluasan alternatif solusi kebijakan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam memperjelas masalah dan menganalisis dampak kebijakan masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik belum sepenuhnya terintegrasi

dalam keseluruhan proses formulasi kebijakan.

3. Implikasi Partisipasi Publik terhadap Kepercayaan Masyarakat

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa tingkat dan kualitas partisipasi publik berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Partisipasi yang terbatas pada tahap

informasi dan konsultasi cenderung hanya menghasilkan kepercayaan yang bersifat sementara. Sebaliknya, partisipasi yang melibatkan kemitraan dan pengawasan mendorong terbentuknya kepercayaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan utama, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang masih dianggap sebagai rutinitas tahunan tanpa dampak nyata.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses dan siklus kebijakan publik.
3. Kurangnya transparansi terkait tindak lanjut hasil Musrenbang dan konsultasi publik.

4. Strategi Penguatan Partisipasi Publik dan Kepercayaan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui partisipasi publik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kebijakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
2. Memperluas keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan dalam proses konsultasi.

3. Mengembangkan model kemitraan kebijakan berbasis kolaborasi (*co-creation*) antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan berbasis umpan balik masyarakat.

Dengan memperkuat partisipasi publik yang bersifat substantif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh sekaligus meningkatkan kualitas formulasi kebijakan daerah.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam formulasi kebijakan di Provinsi Jawa Barat telah berlangsung melalui berbagai bentuk, baik secara konvensional maupun digital. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui forum Musrenbang, konsultasi publik, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta pemanfaatan platform e-participation seperti aplikasi pengaduan dan kanal komunikasi daring pemerintah daerah. Keberagaman saluran partisipasi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk membuka ruang keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Partisipasi yang bermakna, transparan, dan responsif mampu memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan keterbukaan. Namun demikian, efektivitas partisipasi publik masih dipengaruhi oleh tingkat inklusivitas, tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, serta kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia.

Oleh karena itu, penguatan strategi partisipatif yang berkelanjutan, inklusif, dan didukung oleh teknologi digital menjadi kunci dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). *Public policymaking* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2023). Public trust in government: Theory, measurement, and management. *Public Management Review*, 25(3), 389–407. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2034354>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kim, S. (2024). Trust in local government and public service delivery: Evidence from decentralized governance. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 56–72. <https://doi.org/10.1177/00208523231123456>
- Mannayong, A., Rahman, F., & Putri, D. A. (2024). Digital governance and public participation in Indonesia: Strengthening democratic legitimacy through e-participation. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 145–160.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2023). *Public participation for 21st century democracy*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nurhaliza, R. (2025). Media sosial, transparansi informasi, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 33–48.
- Nurlinah, S., Arsyad, M., & Hamzah, A. (2025). Digital public service and citizen trust: Evidence from

- local government in Gowa, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 15(1), 87–102.
- OECD. (2023). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/339306da-en>
- Putra, R. A., & Rachman, I. (2024). E-musrenbang and public trust in local government: Evidence from Indonesian municipalities. *Policy & Governance Review*, 8(2), 101–117.
- Riduan, M. (2025). Partisipasi publik dalam kebijakan daerah: Antara simbolisme dan substansi demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 1–16.
- Sholihah, N., & Santoso, B. (2024). Public participation and trust building in local governance: Lessons from Indonesian local governments. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3), 201–218.